

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Chiefdom Madinah. *Kecurut Kekuasaan Pada Zaman Awal Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabel, 2016.
- Adhyasta Dirgantara, Novianti Setuningsih. “Ini Alasan Ribuan Kades Demo Tuntut Masa Jabatan Jadi 9 Tahun.”
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Aldiansyah. “Persepsi Masyarakat Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Kec Syiah Kuala Kota Banda Aceh).” *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh* (2024).
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Nidzam al-Hukm fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah, 2001.
- Arake, Lukman. “Sistem Pengangkatan Presiden dalam Fikih Siyasa.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019).
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Ketatanegaraan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Ayubi, Zafarurrifqon. “Politik Hukum Rancangan Perubahan Undang-Undang Tentang Desa Mengenai Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari’ah,” 2023.
- Basuki Kurniawan. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2020.
- Budi Santoso. “Optimalisasi Pembangunan Desa Melalui Perpanjangan Masa

- Jabatan Kepala Desa.” *Jurnal Pembangunan Daerah* 12 No. 1 (2024): 45.
- Danil, Muhammad. “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mk No 42/Puu-Xix/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa” (2033).
- Darmawan, Franky Satrio, dan Dian Andriawan Daeng Tawang. “Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/PID. B/2018/PN. JKT UTR.” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2018): 497–521.
- Desta Angga Ramadani *Anshorullah *Adeb Davega Prasna *Anne Ajriadesta. “Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional.” *Limbago: Journal Of Constitutional Law* Vol. 4 No. (2024): 340–348.
- Detik.com. “Apdesi Minta Masa Jabatan Kepala Desa Sampai 27 Tahun.”
- Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemasalahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: :Prenadamedia Group, 2007.
- Drs. Jubair Situmorang. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Fadilah, Hilwa Nurrahmah, Beni Ahmad Saebani, dan Yana Sutiana. “Tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun.” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (2025): 3078–3090.
- Fanggi, Prandy A L. “Analisis Konseptual *Stufenbau Theory* Terhadap Tata

- Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Rekomendasi Hukum* 1, no. 2 (2025).
- Febriansyah, Ferry Irawan. “Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.” *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 220–229.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamid, Nasuhi. “Refleksi.” *Jurnal Kajian Agama dan Filsafat* Vol. X No. (2008).
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/refleksi/article/view/39820/pdf> .
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- . *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hutasuhut, Ullynta Mona, dan Agus Hermanto Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyasa Dusturiyah” 2, no. 2 (2022): 135–152.
- Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat. “Baleg Kembali Gelar Rapat Panja RUU Desa.” Last modified 2023. Diakses Januari 21, 2026.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45176/t/Baleg+Kembali+Gelar+Rapat+Panja+R%0AUU+Desa> .
- Indonesia, Sekretariat Negara Republik. “Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, pasal 5” (2011).

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*. Kencana, 2016.
- Irfani, Nurfaqih. “Asas *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*: pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–325.
- Jubair Situmorang. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Kamizi, Fajar, Sarkowi Sarkowi, Marzuki Marzuki, dan Dodi Irawan. “Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia.” *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 17–24.
- Kushandajani, Kushandajani. “Implikasi uu no. 6 tahun 2014 tentang desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.” *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2017): 53–64.
- Lubis, Mhd Teguh Syuhada. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 92–112.
- Luthfy, Riza Multazam. “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi.” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 319–330.
- Majid Khadduri. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore: Johns Hopkins University, 1987.
- Malec, Andrzej. “Legal Reasoning and Logic.” *Studies in Logic, Grammar and Rhetoric* 4(17) (2001): 97.
- Al Malik, Rafi, Radian Salman, dan Rosa Ristawati. “Politik Hukum Perpanjangan

- Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Pembatasan Kekuasaan dan Akuntabilitas.” *PUSKAPSI Law Review* 4, no. 2 (2024): 204–219.
- Mardianto, Kevin. “Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Bingkai Demokrasi Konstitusional.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025).
- Marzuki. *Penelitian Hukum*, n.d.
- Maslul, Syaifullahil. “Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.” *Jurnal Literasi Hukum* 6, no. 2 (2022): 131–140.
- MD, Mahfud. “Demokrasi Desa dalam Perspektif Konstitusi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 15 No. 3 (2018): 577–598.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 2nd ed. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Misnan, Misnan. “Sejarah Kodifikasi Hukum Islam (Taqnin) di Negara Islam.” *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 01 (2021).
- Moch. Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro’, and Rizki Dermawan. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Andi, dan and Yennie K. Milono Asrun, Abdu Rahmat Rosyadi. “Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuikah Dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan.” *Kanun Hukum, Jurnal Ilmu hukum* 21(2) (2019): 280–281.
- Muliawati, Anggi. “Demo di DPR, Kades Tuntut Pemerintah Revisi UU Desa.” Last

modified 2023. Diakses Januari 21, 2026. <https://news.detik.com/berita/d-6519528/demo-di-dpr-Kepala-Desa-tuntut-pemerintahrevisi-uuAdesa>.

Mulyono, Sutrisno Purwohadi. “Sinergitas Penyelenggaraan pemerintahan desa pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 438–444.

Ost, François. *Legal System between Order and Disorder*. Oxford: Clarendon Press oxford, 2002.

Pambudhi, Hario Danang. “Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme.” *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (2023): 25–46.

Permadi, Danang. “Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Pemikiran Al-Mawardi).” *EKSYA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 10–17.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Putra, Erik Purnama. “DPR Sepakati Revisi UU Desa Masa Jabatan Kepala Desa 8 Tahun Masimal 2 Periode.” Last modified 2023. Diakses Januari 21, 2026. https://news.republika.co.id/berita/s8goni484/dpr-sepakati-revisi-uuAdesamasa-jabatan-Kepala-Desa-8-tahun-maksimal-2-periode#google_vignette.

Rachman, Budhy Munawar. *Argumen Islam Untuk Sekularisme*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Rahyunir, Sri Maulida. *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015.

Ramadani, Desta Angga. “Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional.” *Hukum Tata Negara*, 2024.

- Ramlan, Muhammad Edy. "Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara." *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 7, no. 1 (2023): 42–59.
- Ramli, Afzal, M., & Ardika, G. "Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 10(2) (2019): 136–137. <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i2.1969>.
- Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Rinaldo, M Edwar, dan Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84.
- Rofila. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia Dalam Pasal 7 Uud 1945 Perspektif Fiqh Siyasah" (2023).
- Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana, dan Nyoman Prabu Buana. "Correlation Theory of AV Dicey Perspective of the Rule of Law in Indonesia." *Focus Journal Law Review* 2, no. 1 (2022): 1–9.
- S, Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Santoso, Lukman. "Eksistensi Taqin dalam Negara Hukum Modern dan Relevansinya dalam Dinamika Legislasi di Indonesia." *El-Dusturie* 2, no. 1 (2023).
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*

Tahun 1945: Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2020.

Sellika, Sellika Aprilia Permata, Demas Brian Wicaksono, dan Irwan Kurniawan Soetijono. "Analisis Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Atas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa." *AMAR* 3, no. 2 (2025): 81–90.

Siddiqy, Farhan Abdullah Amir, Beni Ahmad Saebani, dan Yana Sutiana. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025): 3190–3202.

Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum: Konsep Dan Metode, Cet.1*. Malang: Setara Press, 2013.

Sri, W, dan Ananda ZNSSSAF. "Benturan Norma dalam Implementasi Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori pada Surat Edaran dan Undang-Undang." *Reformasi Huk* 28, no. 3 (2024): 234–250.

Sutrisno, Sutrisno, dan Mahfudz Fahrazi. "Penentuan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 6 (Enam) Tahun Dengan 3 (Tiga) Kali Periode Didalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Teori Pembatasan Kekuasaan (Studi Di Desa Bendo Dan Desa Semen Kecamatan Pagu Kab. Kediri)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2025): 218–227.

Wahjono, Padmo. *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*. Jakarta: Melati Study Group, 1977.

Warsudin, D., & Hamid, H. "Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara

Hukum dan Demokrasi.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10(1) (2023): 424.

Wasistiono, S., & Tahir, M. I. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia, 2017.

Yani, Ahmad. “Penataan pemilihan kepala desa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 456–478.

Yuda Riskiawan. “Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” 2023.

Zahid, Moh. “Konsep Syûrâ Dalam Pandangan Fiqh Siyâsah.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2009): 17–30.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li Dirasat al-Syari’ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1996.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2024), Pasal 39.” (n.d.).